

**Gotong Royong dan Solidaritas Internal Partai Politik
(Studi di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi)**

Oleh:

Indriani Dyah Pangestika

E-mail: indrianidyah94@gmail.com

Pendidikan Sosiologi – Fakultas Ilmu Sosial – Universitas Negeri Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara memaknai konsep gotong royong dalam kehidupan berpolitik di DPC PDI Perjuangan, dan untuk mengetahui implementasi dari konsep gotong royong dalam membangun solidaritas partai politik di DPC PDI Perjuangan Ngawi. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di DPC PDI Perjuangan Ngawi. Informan di dalam penelitian ini adalah pengurus inti yang sangat berpengaruh dalam kepartaian di DPC PDI Perjuangan Ngawi, yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Konsep gotong royong menurut PDI Perjuangan adalah manifestasi untuk membangun modalitas sosial, modalitas ekonomi, modalitas kebudayaan dan modalitas politik dalam rangka menuju tersinerginya kekuatan bersama. Pola seperti ini merupakan bentuk nyata dari solidaritas mekanik yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. PDI Perjuangan berusaha untuk berdaulat di bidang politik dalam pengelolaan keuangan partai dengan mendirikan Dana Gotong Royong.

Kata Kunci : *Gotong Royong, Partai Politik, Solidaritas*

Gotong Royong and Internal Solidarity in Political Party
(Study in Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi)

Author:

Indriani Dyah Pangestika

E-mail: indrianidyah94@gmail.com

Sociology Education – Social Science Faculty – Yogyakarta State University

ABSTRACT

This study was aimed to know how to understanding *gotong royong* concept in political life in DPC PDI Perjuangan, and to know the implementation of *gotong royong* in building the political party solidarity in DPC PDI Perjuangan Ngawi. Experimental design of this study was descriptive qualitative method where took place in DPC PDI Perjuangan Ngawi. The informant was the highly-influencing main party managers in DPC PDI Perjuangan Ngawi, who were chosen by using purposive sampling technique. The methods used to collecting data were interview, observation, and documentation. Technique of the data analysis was interactive model Miles and Huberman. Concept of *gotong royong* according to PDI Perjuangan is a manifestation to build social modality, economical modality, cultural modality, and political modality in order to integrate the social power. Such pattern is the real form of mechanical solidarity which is existed in Indonesian society. Political party is identic with power. Power in this case is solidarity, toward the power is a political action, and impossible to be achieve. PDI Perjuangan endeavors to be independent in the political field on the party finances management by conducting *Gotong Royong* Fund.

Keyword : *Gotong royong*, Political Party, Solidarity

A. PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk individu yang sekaligus juga merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), oleh karena itu manusia memiliki karakteristik khas yang membedakan dirinya dengan yang lain, serta selalu hidup berkelompok dengan yang lainnya. Kehidupan berkelompok manusia dilatarbelakangi oleh kondisi keterbatasan kemampuan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disisi lain kebutuhan hidup manusia selalu berubah dan berkembang. Oleh karena itu, pola kehidupan berkelompok manusia bersifat dinamis. Didorong oleh adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri dan dibantu oleh akal pikiran yang dimilikinya, maka manusia membentuk kelompok-kelompok sosial. Setiap pekerjaan dilakukan secara bersama-sama tanpa melihat kedudukan seseorang tetapi lebih melihat pada keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan yang ada di masyarakat atau biasa kita sebut dengan gotong royong.

Gotong royong pada dasarnya adalah kata kunci yang mengungkapkan prinsip-prinsip tradisional organisasi sosial yang masih kuat. Dalam sejarah politik Indonesia, kosa kata gotong royong banyak dipopulerkan oleh Soekarno, Presiden pertama dan sekaligus pendiri Partai Nasional Indonesia, cikal bakal PDI Perjuangan. Pada saat itu Presiden Soekarno memakai istilah Gotong Royong sebagai simbol demokrasi terpimpin, ia sebenarnya memanfaatkan konsep yang dikeramatkan dalam kehidupan rakyat Indonesia. Gotong royong menunjukkan hasil yang luar biasa selama masa-masa revolusi.

Presiden Soekarno menyebut gotong royong merupakan perasan lanjutan dari dasar Negara Pancasila karena semangat dan institusi gotong royong telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari pada hampir seluruh suku bangsa atau masyarakat adat di Negeri ini. Kosa kata itu menjadi sangat populer ketika digunakan oleh Soekarno dalam pidato di sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945. Selanjutnya Soekarno juga memakai istilah

gotong royong ketika membentuk DPR-Gotong Royong pada tahun 1960. Istilah gotong royong ditambahkan dibelakang nama DPR untuk menekankan konsepsi Presiden Soekarno bahwa DPR-Gotong Royong yang dibentuk saat itu memiliki konsep dan cara kerja yang berbeda dengan parlemen di masa demokrasi liberal (1950-1959) (Dwipayana, 2013).

Pemerintahan Megawati Soekarnoputri, pada saat menjabat sebagai presiden, Megawati menamakan kabinetnya dengan istilah "Gotong Royong", sama seperti saat pemerintahan Presiden Soekarno yang sangat menjunjung gotong royong. Pemerintahan saat itu dijalankan secara kolektif dengan merangkul berbagai kekuatan modal sosial dan modal politik untuk bekerjasama dengan semangat gotong royong. Tidak hanya berhenti pada pemerintahan Megawati saja, partai politik PDI Perjuangan kembali melahirkan pemimpin Indonesia pada tahun 2014 yaitu Presiden Joko Widodo yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada

pemerintahan Presiden Jokowi, selalu menyinggung tentang adanya revolusi mental yang selalu digembor-gemborkan oleh para petinggi di negeri ini.

Nilai gotong royong cukup pas untuk melakukan revolusi sikap dan karakter, karena revolusi karakter memerlukan perpaduan nilai. Nilai gotong royong merupakan kepribadian bangsa dan menjadi bagian dari budaya Indonesia. Bangsa Indonesia tentunya tidak perlu mengimpor nilai dari luar karena ada banyak nilai luhur yang sudah tertanam sejak dulu, yakni nilai gotong royong (Yugha, 2014: 106).

Partai politik yang dipilih menjadi studi kasus adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mengapa memilih PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan merupakan salah satu partai yang memiliki jejak sejarah yang panjang. Solidaritas merupakan alat yang seharusnya dijadikan anggota masyarakat ataupun anggota dalam partai politik di DPC PDI Perjuangan Ngawi sebagai alat untuk memupuk rasa persaudaraan antar anggota. Sikap

santun, ramah serta gotong royong jika tidak dilestarikan pasti akan menimbulkan sikap apatis (acuh tak acuh) di kalangan masyarakat Indonesia.

Adanya sikap apatis menimbulkan masyarakat yang tidak partisipatif dan kurangnya rasa solidaritas terutama solidaritas sosial. Sebagai warga negara yang baik, terutama warga negara Indonesia yang baik, harus lah memiliki sikap partisipasi, salah satu sarana untuk berpartisipasi adalah partai politik. Berdasarkan beberapa uraian diatas mengenai permasalahan terkait jiwa gotong royong dan juga yang mengakibatkan solidaritas internal partai politik meningkat dan menurun menjadi salah satu permasalahan dalam kepartaian di Indonesia saat ini, oleh karena itu menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Dengan alasan demikian, maka peneliti melakukan penelitian mengenai gotong royong dan solidaritas internal partai politik. Studi dilakukan terhadap partai politik PDI Perjuangan di Dewan

Pimpinan Cabang Kabupaten Ngawi.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Politik

Politik secara etimologis berasal dari kata *polis* (bahasa Yunani) yang artinya kota. Kemudian diturunkan kata lain seperti *polities* (Warga Negara), *Politicos* (kewarganegaraan atau *civics*) dan *politike tehne* (kemahiran politik) dan *politike episteme* (ilmu politik).

Belakangan muncul banyak pengertian dan penafsiran politik tersebut didasari perbedaan latar belakang, sudut pandang serta perbedaan pemahaman para tokoh politik yang kesemuanya dalam menafsirkan telah memberi warna yang berbeda-beda dalam pengertiannya. Namun bermacam-macam pengertian tersebut tetap bermuara pada substansi yang sama.

Pendapat lain diungkapkan oleh Miriam Budiarjo yang dikutip oleh Sudijono Sastroatmojo (1995: 1) secara umum politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses penentuan

tujuan serta pelaksanaan tujuan dari sistem tersebut. Sementara Sudijono menambahkan “penentuan atau perumusan tujuan merupakan proses seleksi antara berbagai alternatif yang ada serta penentuan kebijakan umum (*public policy*), baik berupa pengaturan maupun alokasi sumber daya yang ada dalam masyarakat, sedangkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut perlu adanya aturan-aturan dan norma-norma dan menyelesaikan konflik yang timbul.

2. Partai Politik

Partai politik digambarkan banyak kalangan sebagai kelompok yang terorganisir dengan struktur keanggotaan khusus, rapi dan stabil. Namun para ilmuwan politik kebanyakan memberikan penekanan pada sudut yang berbeda-beda dalam mendefinisikan partai politik. Menurut RH Sulton, partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan

kebijakan umum mereka (Wahono, 2002: 31).

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Kini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai politik bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kehadirannya mempunyai sejarah yang cukup panjang, meskipun belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara dan baru ada di negara modern.

3. Konsep Politik

Sejak awal hingga perkembangan yang terakhir ada sekurang-kurangnya lima pandangan mengenai politik. Pertama, politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga, politik

sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan/ atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

4. Fungsi Partai Politik

Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik – (biasanya) dengan cara konstitusional – untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Berikut adalah fungsi partai politik, yaitu 1) Sarana Komunikas Politik, berfungsi untuk menyalurkan berbagai macam suara maupun aspirasi masyarakat supaya

sampai pada pemerintah. 2) Sarana Sosialisasi Politik, sebagai proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. 3) Sarana Rekrutmen Politik, sebagai wadah untuk menampung dan penyeleksian kader-kader politik yang nantinya akan meneruskan kepemimpinan suatu pemerintahan dengan jabatan tertentu. 4) Sarana Pengatur Konflik, Partai politik harus mampu menciptakan suasana harmonis diantara kalangan masyarakat serta mencontohkan persaingan-persaingan sehat dalam mencapai tujuan. 5) Sarana Kontrol Politik, Dalam hal ini partai politik berperan untuk mengingatkan dan meluruskan kebijakan-kebijakan pemerintah. 6) Sarana Partisipasi Politik, berfungsi untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah.

5. Gotong Royong

Istilah gotong royong berasal dari bahasa Jawa. Gotong berarti pikul atau angkat, sedangkan royong berarti bersama-sama. Sehingga jika

diartikan secara harafiah, gotong royong berarti mengangkat secara bersama-sama atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Gotong royong dapat dipahami pula sebagai bentuk partisipasi aktif setiap individu untuk ikut terlibat dalam memberi nilai positif dari setiap obyek, permasalahan, atau kebutuhan orang-orang di sekelilingnya. Partisipasi aktif tersebut bisa berupa bantuan yang berwujud materi, keuangan, tenaga fisik, mental spiritual, keterampilan, sumbangan pikiran atau nasihat yang konstruktif, sampai hanya berdoa kepada Tuhan.

6. Solidaritas

Solidaritas menekankan pada keadaan hubungan antar individu atau kelompok dan mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas juga dapat diartikan sebagai wujud kepedulian antar sesama kelompok maupun individu secara bersama yang menunjukkan pada suatu

keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada persamaan moral, kolektif yang sama, dan kepercayaan yang dianut diperkuat dengan pengalaman emosional (Nasution, 2010).

7. Teori Gotong Royong

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang berperilaku menolong atau gotong royong yang ditinjau dari beberapa teori diatas yaitu teori evolusi yang lebih memfokuskan seseorang menolong untuk perlindungan kerabat dan timbal balik biologis, sedangkan dalam perspektif teori pertukaran sosial lebih memfokuskan kepada tingkah laku atau adanya kepentingan pribadi yang bersifat memberi dan menerima (*take and give*).

Dalam teori empati seseorang menolong karena tindakannya akan meningkatkan perasaan positif dan mengurangi perasaan negatif atas dirinya. Teori norma sosial beranggapan bahwa seseorang akan memberikan pertolongan karena adanya norma timbal balik dan norma tanggung jawab sosial.

8. Teori Solidaritas

Konsep solidaritas sosial merupakan konsep sentral Emile Durkheim. Durkheim menyatakan bahwa solidaritas sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional. Wujud nyata dari hubungan bersama akan melahirkan pengalaman emosional, sehingga memperkuat hubungan mereka.

Pada sistem politik sangat diperlukan kesadaran kolektif dan individu. Seperti yang telah diuraikan diatas dalam teori Durkheim bahwa solidaritas merupakan alat yang sangat penting untuk memupuk rasa persaudaraan antar anggota, dan ikatan yang mempersatukan individu pada solidaritas mekanik yaitu dengan adanya kesadaran kolektif. Jika dalam partai politik terbangun solidaritas yang kuat maka tidak dapat dipungkiri partai tersebut akan menjadi partai politik yang solid.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh fakta.

2. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian yang berjudul “Gotong Royong dan Solidaritas Internal Partai Politik (Studi di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kab.Ngawi)” ini merupakan sebuah kajian penelitian yang dilakukan di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi. Tepatnya di Jalan Raden Ajeng Kartini No 20, Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan pada bulan April-Mei 2017.

4. Subjek Penelitian

partai politik di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data primer,

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara. Sedangkan, Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap peristiwa yang sedang berlangsung dan melakukan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman & Purnomo, 2009: 52).

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2007: 216).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen (Usman & Akbar, 2009: 69)

d. Studi pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan mencari referensi yang sesuai dengan tema yang diteliti.

7. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel di dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan subjek penelitian dengan berdasarkan pada kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya (Idrus, 2009: 93).

8. Validitas Data

Untuk menguji validitas penelitian dapat dilakukan dengan metode triangulasi dimana triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

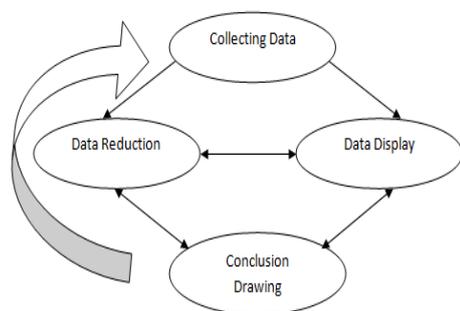
9. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa pertama, catatan lapangan yang digunakan untuk mencatat segala kejadian yang berlangsung di lapangan. Kedua, rekaman wawancara, digunakan untuk mendukung data yang diperoleh

dengan cara merekam suara informan dan juga agar didapatkan informasi yang lengkap karena keterbatasan daya ingat peneliti. Ketiga, pedoman observasi yang berisikan lembar pengamatan dan diisi oleh observer. Keempat, pedoman wawancara yang berisikan daftar pertanyaan wawancara sebagai acuan atau pedoman peneliti dalam mencari data.

10. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman.



Gambar. Model interaktif Miles dan Huberman.

D. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Partai Politik

a) Latar Belakang berdirinya PDI Perjuangan

Berdirinya PDI Perjuangan berawal dari berfusnya lima partai politik pasca pemilu 1971, yang tergabung dalam Kelompok Demokrasi Pembangunan. Kelima partai politik itu adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Murba, Partai Kristen Indonesia (PARKINDO) dan Partai Katolik.

Semua partai politik tersebut berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tanggal 10 Januari 1973. Berfusnya kelima partai politik tersebut memang tidak lepas dari peranan pemerintah saat itu yang berupaya menjalankan agenda politik, memperkecil jumlah partai politik dengan alasan untuk lebih mudah mengendalikan stabilitas politik.

b). Berdirinya DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi

DPC atau Dewan Pimpinan Cabang merupakan suatu dewan eksekutif partai yang terdiri dari sejumlah orang yang menjalankan program dan mengendalikan roda organisasi di tingkat Kabupaten. Selain itu Dewan Pimpinan Cabang adalah lembaga (Organisasi) yang memiliki wewenang tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang (MUSCAB). Dewan Pimpinan Cabang merupakan lembaga diatas Anak Cabang (Tingkat Kecamatan). Ketua DPC biasanya dipilih dalam suatu Musyawarah Cabang atau Konferensi Cabang. Serta perekrutan anggota baru dengan cara KTA-nisasi (Pendaftaran anggota baru).

c) Ideologi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Ideologi sebagaimana yang seringkali dipahami adalah sebagai dasar, pijakan dan penuntun bagi seseorang, kelompok atau organisasi

dalam menjalankan kehidupannya (organisasi). Ini yang disampaikan oleh Gramsci (Simon, 2000: 83) *“Ideologi mengatur manusia dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi mereka, perjuangan mereka dan sebagainya”*.

Ideologi PDI Perjuangan adalah Pancasila 1 Juni 1945, karena di dalam Pancasila 1 Juni 1945 terkandung “ruh” dari gotong royong. Bung Karno memeras kelima sila tersebut menjadi tri sila (tiga sila) bahkan eka sila (satu sila). Dasar dari kelima sila Pancasila tersebut mengandung makna yaitu gotong royong. Pancasila 1 Juni 1945 juga merupakan kristalisasi dari nilai, kearifan, pengetahuan, pengalaman, perjuangan, cita-cita dan harapan sebuah Negara.

2. Hasil Temuan dan Pembahasan

a) Makna Gotong Royong dalam Partai Politik

Gotong royong adalah bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia dan merupakan warisan budaya bangsa. Nilai dan perilaku

gotong royong bagi masyarakat Indonesia adalah menjadi pandangan hidup, sehingga tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kehidupan sehari-hari. Pola hidup yang seperti ini merupakan bentuk nyata dari solidaritas mekanik yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Konsep gotong royong menurut PDI Perjuangan adalah manifestasi untuk membangun modalitas sosial, modalitas ekonomi, modalitas kebudayaan dan modalitas politik dalam rangka menuju tersinerginya kekuatan untuk mencapai kebersamaan.

b) Bentuk Gotong Royong dan Solidaritas di dalam Partai Politik

Gotong-royong sebagai solidaritas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama mereka yang membentuk komunitas-komunitas, karena dalam komunitas seperti ini akan terlihat dengan jelas. Berikut ini adalah kegiatan gotong royong dan solidaritas di dalam partai politik.

No	Gotong Royong	Solidaritas
1.	Bekerjasama dalam kegiatan Bakti Sosial dalam Partai	Menyukseskan kegiatan bakti sosial
2.	Bekerjasama dalam pemnangan pemilu	Berpartisipasi dalam pemenangan pemilu dan menyukseskan kampanye pemilu
3.	Bekerjasama dalam penyelenggaraan HUT Partai	Menyukseskan acara HUT Partai
4.	Kerja Bakti	Mengikuti kerja bakti yang dilaksanakan dalam partai dengan baik
5.	Pengadaan Dana Gotong Royong dalam Partai	Berusaha mengumpulkan dana gotong royong secara bersama-sama

Hubungan antar individu dalam partai tidak hanya akan menimbulkan dampak positif saja, namun juga tidak lepas dari adanya hubungan disosiatif atau interaksi yang dapat berdampak negatif bagi pelakunya, misalnya terjadi konflik ataupun persaingan di dalam partai politik, khususnya pada partai politik di DPC PDI Perjuangan.

Dalam partai politik kegiatan gotong royong tidak hanya dapat menimbulkan interkasi asosiatif saja namun juga interaksi disosiatif. Berikut adalah beberapa interaksi di dalam partai.

No.	Asosiatif	Disosiatif
1.	Adanya gotong royong (kerukunan) dalam partai, dan masih menerapkan konsep gotong royong dalam berpolitik.	Adanya persaingan antar anggota di dalam partai maupun dengan partai lain.
2.	Adanya solidaritas dan kesadaran kolektif dalam partai politik.	Adanya konflik yang terjadi akibat perbedaan pendapat maupun kecemburuan antar anggota partai maupun dengan partai lain.
3.	Adanya koalisi antara dua partai politik dalam mengukung tokoh yang dicalonkan dalam pilkada.	Adanya kontravensi, bentuk kontravensi misalnya berupa perbuatan menghalangi, menghasut, memfitnah, berkhianat, provokasi, dan intimidasi. Contohnya demonstrasi yang dilakukan elemen masyarakat untuk menghalangi atau menolok pemimpin yang berbeda kepercayaan.
4.	Adanya Kooptasi atau penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik suatu organisasi agar tidak terjadi keguncangan atau perpecahan di tubuh organisasi tersebut.	Adanya perselisihan, di mana individu atau kelompok menantang pihak lawan dengan ancaman dan atau kekerasan untuk mencapai suatu tujuan.
5.	Adanya konsolidasi partai sebagai sarana pemersatu.	Adanya diskriminasi, di mana seseorang merasa dikucilkan atau pengucilan kaum minoritas dalam partai.

c) Kegiatan Gotong Royong dalam Partai Politik

Gotong royong dalam partai politik pun banyak di implementasikan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Karena seluruh kegiatan kepartaian diharapkan tujuannya akan berdampak positif bagi masyarakat. Banyak hal yang dilakukan di DPC PDI Perjuangan menggunakan konsep gotong royong, karena hampir semua kegiatan disana dilakukan secara bergotong royong. Setiap program maupun kegiatan partai yang dijalankan oleh PDI Perjuangan memang harus relevan dengan kebutuhan masyarakat, karena tujuan utama dari terselenggaranya program kerja tersebut adalah untuk menyentuh kehidupan rakyat demi kesejahteraan. Tentunya tetap dengan menggunakan konsep gotong royong di dalamnya.

d) Implementasi Konsep Gotong Royong

Implementasi nilai gotong royong pada masyarakat Indonesia khususnya untuk anggota DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi

merupakan bagian esensial dari revitalisasi nilai sosial budaya dan adat istiadat pada masyarakat yang memiliki budaya beragam agar terbebas dari dominasi ideologi yang tidak menyejahterakan.

Wujud implementasi dari konsep gotong royong dalam partai ini adalah dalam bentuk kegiatan-kegiatan partai maupun program partai, karena kegiatan maupun program partai yang dijalankan merupakan alat untuk menarik hati masyarakat.

e) Gotong Royong sebagai Pandangan Hidup Berpolitik

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Collete (1987: 3) bahwa gotong royong telah berakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan merupakan pranata asli paling penting dalam pengembangan masyarakat. Sangat rasional jika nilai gotong royong diimplementasikan dalam perilaku hidup berpolitik dan bertetangga dalam hubungan antar negara di wilayah ASEAN.

Sebagaimana diketahui sebagai suatu organisasi partai

terbentuk dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan demikian menjadikan gotong royong sebagai pandangan hidup berpolitik sangatlah tepat dalam upaya mewujudkan tujuan politik serta menemukan pemecahan berbagai permasalahan yang timbul dalam kehidupan berpolitik. Nilai gotong royong berinteraksi dengan sesama terkandung makna kesetaraan, keadilan, kebersamaan, kepedulian dan mengacu kepada kepentingan bersama.

f) Gotong Royong sebagai Penguat Solidaritas

Salah satu sumber dari solidaritas adalah gotong royong, istilah gotong royong mengacu pada kegiatan saling menolong atau saling membantu dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa solidaritas merupakan alat pemersatu partai dalam berpolitik. Pola hidup yang seperti ini merupakan bentuk nyata dari solidaritas mekanik yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat maupun berpolitik.

Tradisi kerjasama tersebut tercermin dalam berbagai bidang

kegiatan masyarakat diantaranya adalah kegiatan dalam membangun rumah, memperbaiki sarana umum, dalam bencana alam dan lain-lain, terlebih pada partai politik. Di dalam partai politik, membangun solidaritas itu sangat penting demi mempertahankan partai politik tersebut agar tetap berdiri kokoh (Sajogya, 2005: 28).

g) Program Kemandirian Kerja PDI Perjuangan

Konsep gotong royong sudah sejak lama diterapkan dalam partai politik PDI Perjuangan, dari jaman Presiden Soekarno hingga sekarang masih tetap terjaga, karena gotong royong merupakan ideologi partai PDI Perjuangan. Tidak hanya itu, di setiap kesempatan dalam kegiatan, selalu melibatkan konsep gotong royong. Maka, PDI Perjuangan berusaha untuk berdaulat di bidang politik apabila di dalam pengelolaan keuangan partai dapat menerapkan prinsip berdikari "*berdiri diatas kaki sendiri*".

Guna mewujudkan kedaulatan partai tersebut, maka Gerakan Gotong Royong Kemandirian Kerja Partai menjadi

jalan berdikari partai, caranya yaitu dengan adanya Gerakan Dana Gotong Royong. Gerakan dana gotong royong ini dilakukan melalui iuran sukarela anggota, dan bantuan pihak lain yang senafas dan seaspirasi dengan perjuangan partai, atau istilahnya sekarang disebut dengan Dana Gotong Royong. Banyak sekali manfaat dari dana gotong royong itu sendiri yaitu untuk pendidikan politik, program kerakyatan, pemberdayaan perempuan dan lain-lain.

h) Sistem Kaderisasi Partai Politik PDI Perjuangan

Kaderisasi merupakan proses pendidikan dan pelatihan bagi anggota partai yang akan dinaikkan jenjang keanggotaannya menjadi seorang kader dengan tujuan membentuk dan menciptakan kader-kader politik yang mempunyai kemampuan secara pemikiran maupun tindakan yang berkualitas tinggi, selain itu juga mempersiapkan para kader untuk menjadi seorang pemimpin yang berkualitas baik bagi partai, bangsa dan negara.

Pada dasarnya semakin berkualitas dan kuatnya popularitas seorang kader maka akan semakin tinggi tingkat dukungan masyarakat terhadap partai yang menaungi kader tersebut. Setelah melaksanakan penerimaan anggota baru, lalu anggota diterjunkan ke masyarakat untuk dilihat kemampuan dan potensinya dengan diberi nilai dalam setiap kegiatan yang diikutinya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai gotong royong dan solidaritas internal partai politik di Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Ngawi diketahui bahwa Gotong royong adalah bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia dan merupakan warisan budaya bangsa. Nilai dan perilaku gotong royong bagi masyarakat Indonesia adalah menjadi pandangan hidup, sehingga tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kehidupan sehari-hari.

Pola hidup yang seperti ini merupakan bentuk nyata dari solidaritas mekanik yang terdapat dalam kehidupan masyarakat

Indonesia. Tentunya dalam partai politik pun tidak jauh dari kata kekuasaan. Mereka yang ada di partai politik tentunya sangat menginginkan kekuasaan untuk kepentingan masyarakat maupun kepentingan partai politik secara pribadi.

F. SARAN

1. Lebih mendekatkan diri antara pejabat publik atau petinggi di partai dengan masyarakat. Harus lebih banyak mengadakan sosialisasi-sosialisasi kepada warga masyarakat supaya penyampaian informasi dan opini masyarakat bisa sampai ke pemerintah dengan baik, tanpa adanya kesalah pahaman dari kedua belah pihak. Dan juga agar program – program yang ditujukan kepada masyarakat tidak salah sasaran.

2. Langkah PDI Perjuangan mendirikan Dana Gotong Royong itu sebagai awal suatu proses dimana partai politik di Indonesia membangun basis dananya secara terbuka dan halal. Hal itu akan mulai mengurangi stigma yang selama ini ada bahwa parpol

cenderung lekat sebagai “*pemakan uang negara*”. Nanti dampaknya juga akan baik ke kader partai. Karena nanti semua transparan, kader pun bukan lagi adu banyak duit sumbangan, tapi adu ide dan idealisme. Hal ini diharapkan menjadikan langkah maju PDI Perjuangan untuk diikuti semua partai politik di Indonesia. Caranya adalah dengan mendorong adanya legislasi menyangkut dana gotong royong.

3. Partai politik perlu meningkatkan kualitas program kaderisasi khususnya dalam bentuk pendidikan politik secara terprogram dan berkelanjutan disertai program evaluasi model pendidikan politik yang efektif dan efisien yang telah dilaksanakan agar terukur hasil yang diperoleh dari pelatihan dan pendidikan politik serta tidak bersifat monoton kegiatan yang telah dilaksanakan oleh partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rozak, JJ. 1999. *Profil Kenegaraan, Pemikiran al Ghazali dan Ibnu Taimiyah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu*

- Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta..
- Badrun, Ubedillah. 2016. *Sistem Politik Indonesia: Kritik dan Solusi Sistem Politik Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bintarto. 1989. *Interseksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Dwipayana, Ari. 2013. *Pembiayaan Gotong Royong (Studi tentang Dinamika Pembiayaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Periode 1993-1999)*. Tesis/Disertasi S3. Tidak diterbitkan. Universitas Gadjah Mada.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasiwan. 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Nasution, Zulkarnain. 2010. *Konflik dan Lunturnya Solidaritas Sosial Masyarakat Desa Transisi*. Malang: UMM Press.
- Ritzer, George & Goodman Douglas J. 2011. *Teori Sosiologi, Edisi: Terbaru*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Sarwono. 2002. *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sastroatmojo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang
- Simon, dkk. 2000. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata, Syaodih Nana. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasmara.
- Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto. 2005. *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wahono, Untung dan Eman Sulaeman. 2002. *Pandangan Ulama Ikhwan Terhadap Partai Politik*. Jakarta: Pustaka Tarbiatama.
- Yugha. 2014. *Profil Partai Politik Peserta Pemilu*. Jakarta: Penerbit Erlangga.